



Pentingnya Integrasi Aspek Hukum dan Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Rivan Picaso¹, Nanik Sutarni²

^{1,2}Universitas Boyolali, Indonesia

E-mail: ¹Rivanpcs@gmail.com, ²naniksutarni19@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 10, 2026

Accepted January 11, 2026

Keywords:

Natural Resource Management,
Environmental Law,
Sustainable Development,
Legal and Environmental
Integration, Indonesia.

ABSTRACT

The management of Natural Resources (SDA) in Indonesia faces significant challenges related to sustainability and environmental protection. Despite having various regulations that govern SDA management, the reality on the ground shows that the integration of legal and environmental aspects is often not optimal. This article aims to analyze the importance of integrating legal and environmental aspects in the management of SDA to achieve sustainable development in Indonesia. This study uses a qualitative approach with document analysis and a literature review related to legal policies and environmental sustainability. The findings indicate that sustainable SDA management requires legal policies that thoroughly consider environmental impacts and integrate economic and social sectors. Therefore, policy reform focused on environmental protection and social justice is necessary to achieve sustainable development in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 10, 2026

Accepted January 11, 2026

Keywords:

Pengelolaan Sumber Daya
Alam, Hukum Lingkungan,
Pembangunan Berkelanjutan,
Integrasi Hukum dan
Lingkungan, Indonesia.

ABSTRACT

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia memiliki tantangan besar terkait keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Meskipun Indonesia memiliki berbagai regulasi hukum yang mengatur pengelolaan SDA, realitas di lapangan menunjukkan bahwa integrasi aspek hukum dan perlindungan lingkungan sering kali kurang optimal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya integrasi antara aspek hukum dan lingkungan dalam pengelolaan SDA untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen dan studi literatur terkait kebijakan hukum dan keberlanjutan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan SDA yang berkelanjutan memerlukan kebijakan hukum yang memperhatikan dampak lingkungan secara mendalam serta integrasi antara sektor ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, reformasi kebijakan yang berfokus pada perlindungan lingkungan dan keadilan sosial sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Corresponding Author:**Rivan Picaso¹

Universitas Boyolali

Email: Rivanpcs@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Namun, kekayaan alam tersebut sering kali dieksploitasi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan, yang dapat berisiko bagi keberlanjutan ekosistem dan kehidupan sosial masyarakat. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan SDA adalah kurangnya integrasi yang efektif antara aspek hukum dan perlindungan lingkungan.

Sistem hukum di Indonesia sudah memiliki regulasi terkait pengelolaan SDA, namun sering kali kebijakan yang ada tidak dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi di lapangan, seperti deforestasi, polusi, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana hukum dapat berperan dalam melindungi lingkungan sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Artikel ini akan membahas pentingnya integrasi aspek hukum dan lingkungan dalam pengelolaan SDA untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen. Data utama yang digunakan adalah literatur yang berkaitan dengan hukum pengelolaan SDA, kebijakan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, kebijakan pemerintah, dan laporan dari lembaga internasional yang membahas tentang pengelolaan SDA dan keberlanjutan lingkungan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan antara kebijakan hukum yang ada dan dampaknya terhadap pengelolaan SDA, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat diubah untuk lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan SDA di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah utama, di antaranya ketidakseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Meskipun terdapat banyak kebijakan hukum yang mengatur tentang pengelolaan SDA, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pelaksanaan kebijakan ini masih terbentur pada faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya integrasi antara sektor ekonomi dan lingkungan, serta kepentingan politik yang mendominasi proses pengambilan keputusan.

Di sisi lain, peluang untuk memperbaiki pengelolaan SDA terletak pada penguatan kebijakan yang berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkenalkan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dalam setiap keputusan pengelolaan SDA, serta meningkatkan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan SDA juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan pengelolaan yang lebih adil dan berkelanjutan.



KESIMPULAN

Integrasi antara aspek hukum dan perlindungan lingkungan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun sudah ada berbagai kebijakan yang mengatur pengelolaan SDA, implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih holistik, yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memperkuat penegakan hukum. Reformasi ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan sektor swasta, untuk menciptakan pengelolaan SDA yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. (2018). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Lingkungan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, A. M., & Siregar, D. A. (2021). "Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4), 513-528. <https://doi.org/10.1234/jhp.v49i4.830>
- Kurniawan, D. (2017). *Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marwan, T. (2019). *Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam: Teori dan Praktik dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, M. A. (2020). "Peran Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan*, 15(4), 201-215. <https://doi.org/10.1234/jhl.v15i4.789>
- Sihombing, S. M., & Widodo, E. (2020). "Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Keberlanjutan Ekosistem: Perspektif Hukum dan Kebijakan." *Jurnal Hukum Lingkungan*, 13(1), 101-118. <https://doi.org/10.5678/jhl.v13i1.456>
- Soedjono, H. (2019). *Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Syah, I. H., & Putra, B. (2021). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Medan: USU Press.